

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1992 untuk pertama kalinya diperkenalkan istilah *corporate governance* dalam sebuah laporan yang disebut *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003). Laporan ini merupakan titik awal yang menandai praktek *corporate Governance* di berbagai negara. Sejak saat itu konsep tata kelola korporasi yang baik terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan melalui prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *Corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *Corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. (Wardani, 2008).

Herwidiyanto (2000) menemukan banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan praktek-praktek bisnis yang ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik. Praktek-praktek bisnis yang tidak sehat ini antara lain ditunjukkan melalui konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan hubungan afiliasi antar pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan; tidak efektifnya peranan dari dewan komisaris; dan lemahnya penegakan hukum. Praktek-praktek bisnis yang tidak sehat seperti inilah yang selanjutnya mendorong pemerintah selaku pemegang otoritas pembuat regulasi untuk menerbitkan berbagai peraturan

yang pada intinya berupaya mendorong penerapan mekanisme tata kelola korporasi yang baik.

Salah satu isu utama dalam penerapan tata kelola korporasi yang baik adalah pemisahan yang tegas antara kepemilikan dan pengawasan. Pemisahan ini sering menimbulkan konflik antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dan manajer yang biasa disebut sebagai *agency problem*. Konflik di antara kedua pihak ini seringkali muncul akibat orientasi kepentingan yang berbeda. Pemegang saham senantiasa berkepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi para manajer seringkali mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda seperti peningkatan fasilitas atau keamanan kerja. Sejumlah mekanisme tata kelola korporasi dapat membantu mengatasi konflik seperti ini, seperti adanya kepemilikan saham oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976); adanya kepemilikan saham institusional atau *blockholders* (Kaplan dan Minton, 1994); dan melalui sistem kompensasi bagi para eksekutif perusahaan (Mehran, 1995). Di samping itu dewan komisaris dapat memainkan peran penting dalam mengawasi para manajer (Fama, 1980). Bahkan ukuran dewan komisaris (*board size*), komposisi komisaris, dan struktur kepemimpinan dewan komisaris mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menentukan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap para manajer (Jensen, 1993)

Struktur kepemilikan saham juga dapat menentukan penerapan tata kelola korporasi yang baik. Peran struktur kepemilikan saham (Morck dkk., 1988) dan struktur komisaris (Yermack, 1996; Bhagat dan Black, 2002) dalam memonitor manajemen agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam konteks tata kelola korporasi telah banyak diteliti. Meskipun hasil

penelitian-penelitian tersebut agak berbeda, namun pendekatan yang digunakan dalam meneliti hubungan antara mekanisme tata kelola korporasi dan kinerja perusahaan pada umumnya sama. Penelitian-penelitian mengenai dampak struktur kepemilikan dan struktur dewan komisaris yang optimal yang berlaku bagi semua perusahaan dan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdivergensi dari level yang optimal akan mempunyai kinerja yang buruk (Belkhir, 2006).

Pandangan alternatif yang juga berkembang adalah bahwa sejumlah mekanisme tata kelola, termasuk struktur kepemilikan dan struktur dewan komisaris, telah tersedia pada saat yang bersamaan dan bahwa mekanisme tata kelola korporasi ditentukan secara *endogenous* berdasarkan prinsip biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Biaya dan manfaat masing-masing mekanisme tata kelola korporasi bisa bervariasi antar perusahaan sehingga penggunaan satu mekanisme tata kelola mungkin lebih menarik bagi suatu perusahaan dibanding perusahaan lainnya. Karena itu masing-masing mekanisme akan digunakan oleh setiap perusahaan sampai pada suatu level di mana biaya marginal sama dengan manfaat marginal. Akibatnya, struktur tata kelola korporasi yang optimal dapat bervariasi antar perusahaan namun dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan yang baik. Berdasarkan pandangan ini, mungkin saja tidak ada korelasi antara struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris dan kinerja perusahaan. Para peneliti yang mengadopsi gagasan ini antara lain adalah Demsetz dan Lehn (1985) yang meneliti determinan dari kepemilikan manajerial; Hermalin dan Weisbach (1991) yang meneliti interaksi antara komposisi dewan direktur dan kepemilikan internal (*insider ownership*) serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan; dan Cho (1998) yang meneliti interaksi antara kepemilikan manajerial, investasi, dan nilai korporasi. Agrawal dan

Knoeber (1996) dan Mak dan Li (2001) juga melakukan penelitian dengan pendekatan yang sama tetapi dengan melibatkan variabel-variabel tata kelola korporasi yang lebih lengkap.

Pendekatan ini juga telah diadopsi oleh sejumlah peneliti di bidang perbankan, seperti Schranz (1993), Booth dkk (2002), dan Belkhir (2006) yang meneliti dampak dari adanya regulasi pada industri perbankan terhadap mekanisme tata kelola korporasi yang dirancang guna memberikan insentif bagi para manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Schranz (1993) meneliti tentang dampak pembatasan (*restrictions*) aktivitas *takeover* terhadap mekanisme tata kelola korporasi, seperti konsentrasi kepemilikan saham dan kepemilikan saham oleh manajer serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Dengan menggunakan sistem persamaan simultan, Schranz menemukan bahwa jika aktivitas *takeover* dibatasi, bank akan memiliki konsentrasi kepemilikan saham dan kepemilikan saham oleh manajer pada level yang lebih tinggi. Karena itu semakin tinggi konsentrasi kepemilikan saham dan kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung menyebabkan profitabilitas yang semakin rendah.

Booth dkk. (2002) meneliti pengaruh regulasi perbankan terhadap peran mekanisme pengawasan internal, seperti adanya anggota dewan komisaris independen (*outside board*), kepemilikan saham oleh manajer (*managerial stock ownership*), serta pemisahan CEO dan ketua dewan direktur. Riset mereka menemukan bahwa dalam industri yang teregulasi seperti perbankan interelasi antara mekanisme tata kelola korporasi tidak sekuat seperti pada industri manufaktur. Temuan ini membawa mereka pada interpretasi bahwa sesungguhnya regulasi berfungsi sebagai substitusi bagi mekanisme pengawasan internal. Tetapi kelemahan analisis mereka terletak

pada bias simultanitas (*simultaneity bias*) sebab mereka mengakui determinasi simultan dari mekanisme tata kelola korporasi yang berbeda tetapi tidak mengontrolnya dalam analisis empiris.

Belkhir (2006) melakukan penelitian tentang dampak dari mekanisme tata kelola korporasi seperti kepemilikan internal (*insider ownership*), kepemilikan institusional (*blockholder ownership*), proporsi direktur independen (*outside board*), struktur kepemimpinan dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan. Dengan menggunakan persamaan simultan, ia menemukan adanya interdependensi antara struktur komisaris dan struktur kepemilikan yang mengindikasikan bahwa perbankan melakukan substitusi mekanisme tata kelola korporasi yang mencoba menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham (*the substitution hypothesis*)

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba mengadopsi penelitian Schranz (1993), Booth dkk (2002), dan terutama Belkhir (2006), dalam konteks industri perbankan di Indonesia. Karena itu permasalahan dalam riset ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah bank melakukan substitusi antara struktur kepemilikan dan struktur dewan komisaris dalam menerapkan tata kelola korporasi?
2. Apakah penerapan tata kelola korporasi melalui mekanisme struktur kepemilikan dan struktur dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja industri perbankan Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dalam menerapkan mekanisme *corporate governance*, bank akan melakukan substitusi antara suatu mekanisme tata kelola korporasi dengan mekanisme tata kelola korporasi yang lainnya.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* yaitu struktur kepemilikan dan struktur dewan komisaris terhadap kinerja perbankan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a) Manfaat Akademik**

Penelitian ini berguna bagi studi tentang kinerja perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance*.

##### **b) Manfaat Praktik**

Penelitian ini berguna bagi para praktisi bisnis pada pengukuran kinerja perusahaan yang menerapkan *corporate governance* khususnya pada perusahaan perbankan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terbagi atas 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pengolahan dan analisis data, serta kesimpulan dan saran.

**Bab 1: Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab 2: Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini, hipotesis dan kerangka berpikir.

**Bab 3: Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan prosedur penentuan sampel, dan teknik analisis data.

**Bab 4: Analisis dan Pengolahan Data**

Bab ini berisi tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis dari data yang telah diperoleh.

**Bab 5: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak – pihak yang membutuhkan.